



Encep Rustandi<sup>1</sup>  
 Yayan Nuryanto<sup>2</sup>

## ETIKA KOMUNIKASI BUDAYA KOLEKTIF APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA WALUYA KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT

### Abstrak

Ciri komunikasi masyarakat kolektif adalah adanya kesantunan yang didasarkan atas norma-norma yang disepakati dalam system konvensi masyarakat. Tujuan penelitian ini mencoba menemukan sebuah pola komunikasi dalam interaksi proses pemerintahan Desa. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis isi karena data yang diambil berupa isi kutipan komunikasi perangkat desa dan pimpinan sebagai isi, lalu mengkaji hirarki untuk menelaah pengaruh isi. Dengan prosedur yang digunakan adalah pada tataran semiotik (semantik-pragmatik) penggabungan beberapa taksonomi Herkner dan Holsti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Kekuatan Jarak *Long Power Distance* pada interaksi Kepala Desa dan Bawahannya sangat kental mengingat Kyai memiliki kredibilitas dan legitimasi dalam konteks kelembagaan, Porses Komunikasi Aparat dengan rekan cenderung lebih egaliter karena adanya kesamaan, terdapat beberapa pola komunikasi kesantunan komunikasi lebih didasarkan pada budaya komunikasi dan nilai yang dianut oleh anggota berupa nilai, norma, pedoman etika interaksi berupa kekuatan jarak sangat terlihat dalam interaksi antara pemimpin dan pegawai pemerintahan lainnya, komunikasi cenderung lebih egaliter.

**Kata Kunci:** Komunikasi, Budaya Kolektif, Pemerintahan Desa

### Abstract

The characteristic of collective community communication is politeness which is based on norms agreed upon in the community convention system. The aim of this research is to try to find a communication pattern in the village government interaction process. The research method used is content analysis because the data taken is in the form of communication quotes from village officials and leaders as content, then examining the hierarchy to examine the influence of the content. The procedure used is at the semiotic (semantic-pragmatic) level combining several Herkner and Holsti taxonomies. The research findings show that the influence of Long Power Distance on the interaction between the Village Head and his Subordinates is very strong considering that the Kyai has credibility and legitimacy in the institutional context, the communication process between officials and colleagues tends to be more egalitarian because of similarities, there are several communication patterns, politeness in communication is more based on culture. communication and values held by members in the form of values, norms, ethical guidelines for interaction in the form of power distance are very visible in interactions between leaders and other government employees, communication tends to be more egalitarian.

**Keywords:** Communication, Collective Culture, Village Government

### PENDAHULUAN

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi, Komunikasi tersebut bagian dari komunikasi organisasi (Silalahi, 2004).

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, aparat, atau birokrasi desa kepada masyarakat desa disebut komunikasi desa. Komunikasi desa, sebagai organisasi formal, dilakukan dalam

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Sastra, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran. email: enceprustandi@ukri.ac.id, yayan.nuryanto@unpad.ac.id

tataran organisasi dengan dua cara: internal dan eksternal. Aparat atau pemerintah desa berkomunikasi internal dengan sesama aparat di dalam desa, baik sejajar maupun ke atas. Aparat atau pemerintah desa berkomunikasi eksternal dengan pihak di luar desa (Dewi, 2021).

Ciri dari komunikasi masyarakat kolektif ditandai dengan adanya penanaman etika. Melihat kondisi saat ini, masalah etika komunikasi selalu muncul di berbagai aspek seperti dalam bidang pemerintahan. Pemerintahan dapat berjalan dengan baik jika komunikasi berlangsung dengan baik begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, untuk menjalankan strategi komunikasi dalam pemerintahan diperlukan etika komunikasi yang baik untuk merencanakan suatu strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa (Saleh, n.d.).

Pemerintah desa seharusnya memiliki peran yang sangat penting dalam akselerasi (pelaksanaan implementasi) proses pembangunan karena peran pemerintah desa adalah memotivasi pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan proses tersebut (Saleh, n.d.). Namun problem dari komunikasi ini adalah kurangnya keterbukaan khususnya bagi pusat pemerintah Desa dan masyarakat. Sikap yang muncul adalah sikap apatis yakni kegananan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut serta kurangnya progresifitas kinerja aparatur pemerintahan.

Hal tersebut sejalan dengan pola komunikasi masyarakat kolektif. Sebagian besar masyarakat di kawasan timur baik di beberapa di kawasan timur tengah, selatan, dan kawasan asia tenggara khususnya Indonesia menganut paham budaya kolektivisme. Paham budaya kolektivisme merupakan suatu pandangan yang beranggapan bahwa kelompok lebih penting daripada individu (Mulyana & Rakhmat, 2009). Terbalik dengan paham individualisme yang memiliki pemahaman sebaliknya. Kolektivisme menekankan kolektivitas, komunitas, dan sosialitas.

Pengaruh budaya Menurut (Triandis et al., 1988), anggota budaya *collectivistic* fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan anggota pada kelompok. Menurut (Hirokawa & Miyahara, 1986) budaya *collectivistic* ditandai dengan homogenitas mereka. Budaya ini menghargai harmoni dan memiliki aturan kaku yang mengatur perilaku yang tepat dan pantas. Selain Harmoni, perasaan dan martabat, komunikasi masyarakat kolektif didasari oleh standar nilai, moral dan agama yang dianut oleh individu dan kelompok. Hal tersebut menjadi dasar perilaku dan etika komunikasi seseorang dalam berinteraksi. Keberadaan kyai dan ustad dalam konteks kepesantrenan lebih sebagai contoh yang dianggap dituakan lebih mengayomi yang lebih muda sebagai bentuk pertukaran dan transfer kesetiaan, maka sebagai imbalannya adalah bentuk kesetiaan dan kepatuhan terhadap group atau kelompok (Yoo et al., n.d.; Hofstede & Bond dalam Kirk St. Amant, 2007: 2; Kaur et al., 2016). Maka, pada penulis akan mengkaji pola komunikasi budaya kolektif pada pusat pemerintahan desa dan menggambarkan pola komunikasi tersebut dengan pendekatan analisis konten pada tingkat semantik dan pragmatik.

### **Komunikasi Budaya Kolektif**

Praktik komunikasi dalam budaya kolektif, (Rodríguez, n.d. 1996: 113) berpandangan bahwa komunikasi tidak langsung atau implisit, sikap menghargai dan kesantunan lebih dihargai. Karena, komunikasi langsung sering dipandang sebagai kasar atau dinilai tidak sopan. Perbedaan antara kolektivisme dan individualisme didasari serta dibentuk oleh norma-norma sosial yang beroperasi di bawah masing-masing orientasi budaya. Seperti adanya kewajiban untuk balas budi yang disebut norma timbal balik. Secara lebih jelas terdapat kepatuhan, harmoni serta komunikasi lebih implisit.

Ciri lain dalam komunikasi masyarakat kolektif yang terlihat pada norma-norma kesopanan adalah dan taktik menyembunyikan wajah *saving face* atau lebih dikenal *dwimuka*. Menurut (Gudykunst et al., 1996) konsep "wajah" mengacu *self claimed* atau bentuk pengakuan diri seseorang, karena wajah merupakan gambaran eksternal seseorang yang dimiliki untuk dirinya sendiri. Demikian pula, (Brown & Levinson, 1987) berpendapat bahwa, "wajah" adalah "citra diri" yang mana setiap anggota masyarakat ingin mengklaim untuk dirinya sendiri. Hal tersebut di dasari karena adanya keinginan untuk menghindari diri dari rasa malu (Gudykunst et al., 1996).

Terdapat beberapa batas-batas khusus sikap, pola perilaku dari tiap masyarakat. Hall (dalam Nishimura et al., n.d.) menjelaskan bahwa mekanisme sikap, perilaku, dan pola komunikasi dipengaruhi budaya. Mekanisme control tersebut terjadi di dalam pikiran. Karena, masyarakat bertidak dan berbicara didasarkan pada batas-batas konvensi atau kesepakatan budaya yang

dianut. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi individu tertentu, apakah sikapnya bisa diterima ataupun tidak.

### **Determinisme Komunikasi Budaya Kolektif**

Adapun dimensi budaya secara umum, seperti jarak kekuasaan (*long power distance*), adanya jarak komunikasi pada tingkat social di masyarakat kolektif, sedangkan pada masyarakat budaya individu tidak terjadi sama sekali atau cenderung longgar. Kemudian dari segi konteks, masyarakat kolektif cenderung menggunakan konteks tinggi (*high context*) yakni tidak langsung atau implisit. Kemudian dimensi polikronik.

Terdapat beberapa batasan khusus mengenai determinisme budaya kolektivisme dan Individualis yang dikutip dari (Kirk St. Amant, 2007; Omari, 2015: 31-34) beberapa dimensi budaya yaitu:

#### **Kekuatan Jarak (*long power distance*)**

Pemahaman mengenai kekuatan jarak dibentuk berdasarkan suatu hirarki pada masyarakat. Kekuatan jarak bisa dipahami sebagai ukuran kekuasaan dalam arti batas tertentu pada suatu kelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Ciri sederhana seperti ayah sebagai kepala keluarga, guru di sekolah, kepada suku atau kepala adat, dan para penguasa.

Secara umum, setiap orang menerima tingkat yang dasarnya tidak merata, seperti dari mana kita berasal, gelar, jabatan, apapun atributnya. Namun, pada praktiknya kita selalu mengakui bahwa seseorang yang lebih dituakan memiliki pengaruh lebih besar dari kita. Kekuatan biasa dijumpai di dalam bidang profesi yang kita geluti, seperti seseorang yang lebih tua kemudian memiliki keahlian dan gelar lebih banyak, tingkat keahlian lebih baik, maka hal seperti ini cenderung memiliki kekuatan lebih banyak. Tampak batas-batas khusus seperti perlakuan dan cara berkomunikasi dari orang sekitarnya (Rahardi & Rahardi, 2005; Chaer & Agustina, 1995, F.X. Nadar, 2004). Lebih jelasnya Phuong-mai (2015: 2-3) menjelaskan bahwa masyarakat kolektif memiliki kepedulian serta kepekaan yang sama terhadap kesenjangan dan kekakuan yang mana tiap-tiap masyarakat memiliki dasar kepedulian yang sama terhadap *long power distance* atau kesenjangan tersebut. Di sini, kualitas belajar seseorang tergantung pada keunggulan guru. Demikian pula, sebuah organisasi di bawah pengaruh budaya yang dominan. Sementara bawahan universal mengandalkan manajer mereka dan struktur organisasi.

#### **Kotek tinggi (*High context*)**

Dimensi budaya terkait konteks sebagai hubungan antara kegiatan komunikasi dan aspek yang mempengaruhinya. Lebih jelasnya konteks didefinisikan sebagai segala informasi yang terkait dan mengelilingi kejadian tertentu. Lebih jelasnya Hall & Hall dalam (Nishimura et al., n.d.) menjelaskan bahwa konteks terkait dengan makna dimana yang mana tiap budaya di dunia dapat dibandingkan pada skala Kotek tinggi (*High context*) dan konteks rendah (*low context*).

Hall (1989) menyarankan kategorisasi budaya dalam konteks tinggi dibandingkan budaya konteks rendah untuk memahami perbedaan dasar mereka dalam komunikasi gaya dan budaya. Gaya komunikasi mengacu pada cara mengekspresikan diri, pola komunikasi yang dipahami memiliki kekhasan.

Seperti masyarakat timur, khususnya masyarakat di Indonesia menganut budaya kolektif dimana dalam komunikasi cenderung menggunakan bahasa tak langsung atau lebih implisit. Phenomena budaya tersebut merupakan dampak dari faktor sosial tertentu, seperti, sejarah, agama dan tradisi. Gaya komunikasi dalam budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah tercermin dalam pola interaksi dan komunikasi. Karena, gaya komunikasi dipengaruhi oleh kedekatan hubungan manusia, terstruktur dengan baik hirarki sosial, dan norma-norma perilaku yang kuat (Kim et al., 1998: 512). Dalam budaya konteks tinggi (*High Context*) makna internal biasanya tertanam mendalam dalam informasi, jadi tidak semuanya secara eksplisit dinyatakan secara tertulis dan diucapkan

Komunikasi Dalam budaya konteks tinggi, pendengar diharapkan dapat membaca "Antara garis", untuk memahami makna yang tak terkatakan atau makna yang tersirat. Hall (1989: 91) menekankan bahwa "komunikasi konteks tinggi terjadi dimana pesan dan informasi sangat terkait baik dengan konteks fisik serta terinternalisasi dalam diri seseorang, dan sangat sedikit kode yang disampaikan secara eksplisit.

Komunikasi dalam budaya konteks tinggi atau *High Context*, seseorang cenderung untuk berbicara satu demi satu dengan cara linear, sehingga penutur jarang terganggu. Kaitan dengan pola komunikasi adalah, menurut (Gudykunst et al., 1996) tidak langsung, ambigu, harmonis,

intim dan bersahaja. Dalam budaya konteks tinggi, komunikasi melibatkan lebih dari informasi dalam fisik konteks atau terinternalisasi dalam diri seseorang; rasa percaya diri lebih besar ditempatkan dalam aspek nonverbal daripada aspek verbal (Edward Hall, 1989).

Sebaliknya, komunikasi dalam budaya konteks rendah (Low Context), makna secara eksplisit dinyatakan melalui bahasa. Orang berkomunikasi biasanya mengharapkan penjelasan ketika sesuatu masih belum jelas. (Edward Hall, 1989) menjelaskan, informasi yang paling diharapkan dalam ditransmisikan pesan untuk menebus apa yang hilang dalam konteks (baik internal dan eksternal). Budaya konteks rendah ditandai dengan komunikasi langsung dan linier dan oleh konstan dan kadang-kadang tidak pernah berakhir penggunaan kata-kata. Komunikasi adalah langsung, tepat, dramatis, terbuka, dan berdasarkan perasaan atau maksud sebenarnya (Gudykunst et al., 1996).

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analyze) karena data yang diambil dalam penelitian ini adalah isi kutipan komunikasi. Menurut Laswell di dalam (Titscher & Ibrahim, 2009) tujuan dari analisis isi untuk menguraikan isi komunikasi yang jelas dan objektif. Data yang di analisis berupa tuturan komunikasi masyarakat Aparatur pemerintahan baik pimpinan dan staf di bawahnya di Desa Waluya Kabupaten Bandung sebagai isi, lalu mengkaji hirarki untuk menelaah pengaruh isi. Adapun prosedur analisis isi yang digunakan adalah pada tataran semiotik (semantik-pragmatik) penggabungan beberapa taksonomi herkner dan Holsti (Titscher & Ibrahim, 2009) terkait efek makna dan efek dari pesan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekuatan Jarak (*long power distance*)**

Proses komunikasi Pemimpin dengan Aparatur berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dilihat dari terjadinya komunikasi, Kepala desa menggunakan gaya kepemimpinan semi-mutlak (benevolent-authoritative). Gaya ini pada dasarnya bersifat otoritarian, tetapi karena seorang pemimpin juga mendorong bawahan untuk berkomunikasi dengan atasan, maka sifat otoriternya menjadi lemah. Gaya komunikasi pemimpin ini menginginkan jalur resmi (Pace et al., 2010).

Proses komunikasi dapat dilukiskan melalui tiga unsur pokok yaitu pengirim isyarat, media untuk mengirimkan isyarat, dan penerima isyarat. Penerima memperoleh simbol-simbol yang telah disampaikan dan membacanya untuk membuat suatu ide (Moekijat, 1993: 150). Peserta komunikasi yang ada di Pesantren terdiri dari kepala desa, aparatur senior dan junior dan masyarakat sekitar. Keempat komponen peserta komunikasi ini masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Pemimpin merupakan figur yang dihormati dan disegani di lingkungan pemerintahan, yang membimbing, mengatur dan memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan di pemerintahan. Pamong desa adalah yang berperan membantu kelancaran proses pemerintahan.

### **Kotek tinggi (*High context*)**

Aparatur dalam berkomunikasi dengan Pemimpin menggunakan sistem "jemput bola" artinya Aparatur selalu menunggu kesempatan untuk bertemu Kepala Desa. Sistem ini dilakukan Aparatur untuk mencari informasi dari Pemimpin dengan cepat berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan Aparatur. Berdasarkan teori pengurangan tingkat ketidakpastian, seseorang yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang ingin segera ditanyakan, maka akan selalu berusaha secepatnya untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu (Liliweri Alo, 1994). Untuk mengurangi tingkat ketidakpastian tersebut Aparatur datang secepatnya ke Pemimpin, dari Pemimpin inilah jawaban atau informasi yang diinginkan didapatkan. Hal ini sesuai dengan penuturan seorang Aparatur sebagai berikut:

"Kalau saya ingin bertemu pak Kades selalu menunggu beliau keluar dari ruangan, langsung menemui beliau sambil bersalaman".

Meskipun demikian komunikasi dengan Pemimpin juga dapat sewaktu-waktu manakala ada permasalahan yang harus dipecahkan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang Aparatur berikutnya mengungkapkan pengalamannya

"Sewaktu-waktu ada permasalahan yang harus dipecahkan, baik pribadi maupun permasalahan lain yang menyangkut instansi dan kehidupan pribadi di pesantren, saya langsung menghadap beliau untuk meminta nasihatnya".

Ungkapan ini juga sesuai dengan pernyataan seorang informan seorang yakni Pimpinan Pemerintahan (pa Kades) yang menuturkan bahwa: "Rumah saya selalu terbuka selama dua puluh empat jam bagi Aparatur dan masyarakat untuk menyampaikan masalah-masalah, kapan saja dapat bertemu dan berkomunikasi".

Proses komunikasi Aparatur dengan Pemimpin kadang-kadang menggunakan komunikasi dua tahap. Proses komunikasi ini terjadi jika Aparatur menghadapi permasalahan, mereka menghadap dahulu ke rekan senior, baru kemudian rekan tersebut akan menghadap kepala Desa secara langsung. Hal yang demikian dilakukan untuk menghindari perkataan dan sikap yang salah dari Aparatur.

Berbeda dengan model komunikasi dua tahap yang konsepnya dihasilkan dari penelitian Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet dalam Effendy (2000: 85) yang alur komunikasinya datang dari atas (top-down) atau media massa, fenomena yang terjadi di lembaga pemerintahan tersebut ditemukan alur komunikasi dua tahap datang dari Aparatur menuju rekan senior, baru kemudian pesan sampai pada seorang Pemimpin. Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang Aparatur yaitu sebagai berikut :

Ketika akan berkomunikasi dengan pak Kades untuk menyampaikan permasalahan pribadi atau masalah umum saya tidak langsung menghadap pak Pa Kades, tapi melalui perantara pak rekan terdekatnya. beliaulah yang menghadap pak Kades untuk menyampaikan permasalahan saya, lalu hasilnya saya terima dari pak.

Suasana komunikasi antara orang terdekat pa Kades dengan Aparatur berbeda dengan suasana komunikasi antara Aparatur dengan Pa Kades. Jika komunikasi dengan pa Kades dengan Aparatur dalam kondisi yang tegang, maka komunikasi antara rekan Aparatur lebih cenderung rileks dan santai. Suasana ini mengindikasikan pada hubungan antarpribadi. Dalam hubungan antarpribadi mencakup dua dimensi yaitu; isi dan hubungan (DeVito, 1991). Dimensi isi berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan oleh komunikator pada komunikan. Sedangkan dimensi hubungan berkaitan dengan tingkat hubungan di antara peserta komunikasi.

### **Menyembunyikan Wajah (*Saving Face*)**

Etika Aparatur terhadap Pemimpin juga menggunakan simbol sebagai lambang komunikasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Effendy (1989: 351) bahwa simbol adalah sesuatu yang digunakan atau dianggap mewakili sesuatu yang lain. Salah satu simbol etika Aparatur terhadap Pemimpin adalah dengan berdiri sambil membungkukkan badan jika kebetulan berpapasan dengan Pemimpin yang sedang lewat. Ini artinya "berdiri sambil membungkukkan badan" merupakan perilaku non-verbal yang mengandung makna penghormatan terhadap Pemimpin. Hal ini sesuai dengan penuturan seorang Aparatur yang mengalami hal tersebut.

"Suatu ketika saya berjalan di lorong jalan, di depan saya ternyata pak Kades sedang jalan juga dengan beberapa rekan aparatur senir, saya jalan agak tergesa-gesa lalu saya berhenti sambil membungkuk sebagai tanda mengjormati dan Beliau melirik saya dengan senyuman".

Berdiri membungkuk adalah isyarat non-verbal. Isyarat non-verbal dalam suatu proses komunikasi biasanya dikendalikan oleh aturan (McLaughlin dalam DeVito, 1991)

Etika semacam ini kelihatan unik dan otoriter. Akan tetapi karena aparatur melakukannya dengan penuh keikhlasan maka aparatur tidak merasakan perasaan tersebut. Hal ini juga didukung oleh tindakan pa kades yang sering kali mempersilakan Aparatur nya untuk berjalan jika melihat aparatur berdiri sambil membungkukkan badan. Ini menandakan bahwa Pemimpin bukanlah seorang yang otoriter. Hal ini sesuai dengan penuturan seorang Aparatur desa yang merasakan bahwa

"Tatkala saya berjalan pada suatu hari di belakang pak Kades, dan Beliau melirik ke belakang memberikan isyarat mempersilakan saya jalan duluan karena pak Kades tahu bahwa saya berjalan agak cepat sedangkan Pemimpin jalannya pelan-pelan dan saya jalan duluan dengan membungkukkan badan dengan menjulurkan tangan kanan ke bawah, tanda hormat kepada pak Kades".

### **2. Ketika Berjumpa di Suatu Tempat**

Bentuk penghormatan Aparatur sebagai etika terhadap pemimpinnya juga dilakukan pada saat berjumpa atau bertemu di suatu tempat. Pada saat bertemu di suatu tempat, Aparatur

berusaha untuk berdiri sebagai penghormatannya, namun bila posisi Aparatur tidak memungkinkan untuk berdiri, maka duduk dengan sopan merupakan alternatif yang dipilih sebagai penghormatan terhadap Pemimpinnya.

Etika komunikasi antara Aparatur muda dan senior, Aparatur yang sudah lama bekerja ditugaskan oleh pa Kades untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan. Oleh karenanya hubungan antara keduanya ibarat hubungan kakak dan adik. Aparatur senior selalu dihormati oleh Aparatur -Aparatur nya sebagai seorang kakak dan juga sebagai wakil. Sebagai seorang kakak dan adik hubungan mereka sangat akrab sekali, tetapi sebagai seorang aparatur senior, Aparatur selalu menghormatinya, karena penghormatan tersebut sehingga menimbulkan jarak hubungan antara Aparatur junior dengan senior. Bahasa yang digunakan oleh keduanya adalah bahasa campuran antara Bahasa Sunda dengan Bahasa Indonesia, melihat situasi dan kondisi. Fenomena tersebut dialami seorang ustad yang menyatakan bahwa:

“Aparatur desa sangat hormat pada senior, tapi dengan rasa hormat itu mereka kadang-kadang tidak terlalu akrab berbeda dengan Aparatur yang bukan senior, mereka kadang-kadang lebih dekat dan akrab karena mungkin mereka menganggap kakak pada saya bukan menganggap sebagai atasan.

Etika komunikasi Aparatur junior dan senior. Etika yang dilakukan adalah tidak berbeda dengan etika yang diterapkan terhadap kepala desa. Hal ini karena aparatur senior merupakan wakil dari Pemimpin yang selalu aktif membantu Pemimpin dalam proses pemerintahan. Oleh karenanya harus dihormati sebagaimana menghormati.

## SIMPULAN

Berdasarkan Hasil analisis dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari terjadinya komunikasi, Pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan semi-mutlak (benevolent-authoritative). Gaya ini pada dasarnya bersifat otoritarian, tetapi karena seorang pemimpin juga mendorong bawahan untuk berkomunikasi dengan atasan. Dilihat dari segi peran, Kepala Desa sebagai orang tua dan Aparatur sebagai anak makan komunikasi cenderung pasif. yang demikian disebabkan karena faktor kredibilitas yang dimiliki oleh Pemimpin. Sehingga dalam budaya kolektif dengan pola long power distance komunikasi dan kritik merupakan hal yang sangat ketat karena aparatur desa sungkan untuk berbicara secara terbuka. Terdapat beberapa konteks komunikasi sekaligus menjadi sebuah tradisi, seperti hendak minta izin pulang, proses penandatanganan, komunikasi Aparatur dengan seniornya, komunikasi Aparatur dengan rekannya, melanjutkan sekolah, mohon doa, mohon petunjuk untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Etika komunikasi pada pusat pemerintahan Desa Waluya bagian proses komunikasi yang terjadi, peran yang dilakukan kepala desa ini berlangsung sesuai dengan tingkat keakuan (ego) yang tepat, Tingkat keakuan (ego) kepala desa mempunyai kedudukan yang tepat sebagai orang tua yang memiliki kecenderungan melindungi, memerintah dan melarang. komunikasi dengan sesama aparatur desa, berkomunikasi hanya mengutamakan adat kesopanan sesuai dengan lingkungan pemerintahan. Sebagai sesama teman komunikasi biasanya berlangsung dalam suasana akrab dan berbahasa gaul atau lebih egaliter.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Charles R & Steven H. Chaffe. (1987). *Handboool of Communication Science*. London: The Publisher of Profesional Social Science.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
- Chaer, A., & Agustina, L. (1995). *Sosiolinguistik: Suatu pengantar*. Rineka Cipta.
- DeVito, J. A. (1991). *Human communication: The basic course (5th ed)*. Harper Collins.
- Dewi, E. N. (2021). *Komunikasi Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Perbatasan Provinsi Jawa Barat—Provinsi Banten*. 2.
- Edward Hall, E. T. (1989). *Beyond culture (Anchor Books ed)*. Anchor Books.
- Effendy, Onong Uchjana. (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Effendy. (2000). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- F.X. Nadar. (2004). *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Graha Ilmu.
- Gudykunst, W. B., Ting-Toomey, S., & Chua, E. (1996). *Culture and interpersonal communication (6. [print.]*). Sage.

- Hall, E. (1976). *Beyond culture*. New York: Doubleday.
- Hirokawa, R. Y., & Miyahara, A. (1986). A comparison of influence strategies utilized by managers in American and Japanese organizations. *Communication Quarterly*, 34(3), 250–265. <https://doi.org/10.1080/01463378609369639>
- Hofstede, G. (1980). *Culture's consequences: International differences in work-related values*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Johannesen, Richard L. (1996). *Ethics in human communication*. Illinois: Waveland Press.
- Kaur, A., Noman, M., & Awang-Hashim, R. (2016). Exploring strategies of teaching and classroom practices in response to challenges of inclusion in a Thai school: A case study. *International Journal of Inclusive Education*, 20(5), 474–485. <https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1090489>
- Kim, D., Pan, Y., & Park, H. S. (1998). High-versus low-Context culture: A comparison of Chinese, Korean, and American cultures. *Psychology and Marketing*, 15(6), 507–521. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6793\(199809\)15:6<507::AID-MAR2>3.0.CO;2-A](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6793(199809)15:6<507::AID-MAR2>3.0.CO;2-A)
- Liliweri Alo, L. (1994). *Komunikasi Verbal dan Nonverbal*. PT Citra Aditya Bhakti.
- Moekijat. (1993). *Teori Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyana, D., & Rakhmat, J. (2009). *Komunikasi antarbudaya panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nishimura, S., Nevgi, A., & Tella, S. (n.d.). *Communication Style and Cultural Features in High/Low Context Communication Cultures: A Case Study of Finland, Japan and India*.
- Omari, J. al. (2015). *Understanding the Arab culture: A practical cross-cultural guide to working in the Arab world (Second edition)*. Robinson.
- Pace, R. W., Faules, D. F., & Mulyana, D. (2010). *Komunikasi organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Puong-mai (2015). *Hofstede's Five Value Dimension of Culture*. Paper for CCA Course.
- Rahardi, R. K., & Rahardi, R. K. (2005). *Pragmatik: Kesantunan imperatif bahasa Indonesia*. Erlangga.
- Rodríguez, J. I. (n.d.). *Deceptive Communication from Collectivistic and Individualistic Perspectives*.
- Saleh, Y. (n.d.). *ETIKA KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MANSAMAT B KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN*.
- Siregar, Ashadi. (1990). *Komunikasi Sosial*. Yogyakarta: Penelitian dan Pengembangan FISIP UGM.
- Silalahi, U. (2004). *KOMUNIKASI PEMERINTAHAN: MENGIRIM DAN MENERIMA INFORMASI TUGAS DAN INFORMASI PUBLIK*. 3(1).
- Titscher, S., & Ibrahim, A. S. (2009). *Metode analisis teks & wacana*. Pustaka Pelajar.
- Triandis, H. C., Bontempo, R., Villareal, M. J., Asai, M., & Lucca, N. (1988). Individualism and collectivism: Cross-cultural perspectives on self-ingroup relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(2), 323–338. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.2.323>
- Yoo, B., Donthu, N., & Lenartowicz, T. (n.d.). *Measuring Hofstede's Five Dimensions of Cultural Values at the Individual Level: Development and Validation of CVSCALE*.